



# SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015

## STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BAUBAU

### LAMPIRAN 11. DAFTAR REGULASI RELEVAN

| No | Nama Dokumen                                                                                                                                                                                                        | Keterangan    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | <u>Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</u>                                                                                                                                                     | Masih berlaku |
| 2  | <u>Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</u>                                                                                        | Masih berlaku |
| 3  | <u>Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi</u>                              | Masih berlaku |
| 4  | <u>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</u>                                                             | Masih berlaku |
| 5  | <u>ISO 9001:2015 tentang Quality Management Systems</u>                                                                                                                                                             | Masih berlaku |
| 6  | <u>Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan</u>                                                        | Masih berlaku |
| 7  | <u>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</u>                 | Masih berlaku |
| 8  | <u>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</u>                              | Masih berlaku |
| 9  | <u>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan</u>                 | Masih berlaku |
| 10 | <u>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point</u> | Masih berlaku |
| 11 | <u>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI)</u>           | Masih berlaku |
| 12 | <u>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</u>                                                  | Masih berlaku |
| 13 | <u>Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan</u>                                                 |               |
| 14 | <u>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</u>                                             | Masih berlaku |
| 15 | <u>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan</u>                          | Masih berlaku |
| 16 | <u>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</u>                              | Masih berlaku |
| 17 | <u>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan</u>                                                     | Masih berlaku |
| 18 | <u>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional</u>                                                                                                         | Masih berlaku |
| 19 | <u>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik</u>                                                                                                          | Masih berlaku |



# SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015

## STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BAUBAU

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 20 | <u>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2019 tentang Pengendalian Residu pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi</u>                                        | Masih berlaku |
| 21 | <u>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa dan/atau Pemenuhan Persyaratan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</u>                                                                                               | Masih berlaku |
| 22 | <u>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pakan Ikan</u>                                                                                                                          | Masih berlaku |
| 23 | <u>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pengendalian Resistensi Antimikroba pada Perikanan Budi Daya</u>                                                                                                                                 | Masih berlaku |
| 24 | <u>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Hasil Perikanan dari Wilayah Negara Republik Indonesia</u>                                                                                                                           | Masih berlaku |
| 25 | <u>Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Checklist dan Format Laporan Hasil Inspeksi pada Sertifikasi Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</u>         | Masih berlaku |
| 26 | <u>Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</u>                                                     | Masih berlaku |
| 27 | <u>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan</u>                                                                                                                                    | Masih berlaku |
| 28 | <u>Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dalam rangka Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</u>                             | Masih berlaku |
| 29 | <u>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</u>                                                                     | Masih berlaku |
| 30 | <u>Peraturan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kode Etik Petugas Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</u>                                            | Masih berlaku |
| 31 | <u>Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2026 tentang Proses Bisnis Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</u>                                                        | Masih berlaku |
| 32 | <u>Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2026 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sertifikasi Mutu Hulu Hilir Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</u> | Masih berlaku |
| 33 | <u>Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2026 tentang Pejabat Penanda Tangan Dokumen Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</u>                                                                      | Masih berlaku |